

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI INFLASI
DI INDONESIA PERIODE 2000.1 – 2011.4**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PRIMAWAN WISDA NUGROHO
NIM. C2B005195

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Primawan Wisda Nugroho

Nomor Induk Mahasiswa : C2B005195

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Inflasi di Indonesia Periode 2000.1 – 2011.4**

Dosen Pembimbing : Maruto Umar Basuki, SE, MSi.

Semarang, 30 Juli 2012

Dosen Pembimbing,

Maruto Umar Basuki, SE, MSi.
NIP. 19621028 199702 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Primawan Wisda Nugroho

Nomor Induk Mahasiswa : C2B005195

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Inflasi di Indonesia Periode 2000.1 – 2011.4.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Agustus 2012

Tim penguji :

1. Maruto Umar Basuki, SE, M.Si. (.....)
2. Drs. H. Edy Yusuf A.G, M.Sc. Ph.D. (.....)
3. Fitrié Arianti, SE, M.Si. (.....)

Mengetahui Atas Nama Dekan,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE, M.Com, PhD, Akt)
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Primawan Wisda Nugroho, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000.1–2011.4, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau gagasan dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai suatu tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Juli 2012

Yang membuat pernyataan,

Primawan Wisda Nugroho
C2B005195

ABSTRACT

One of the problems that often occur in developing countries in implementing the country's development is how to maintain stability and economic growth. Economic stability in terms of stability regarding the price level, the level of national income and employment growth. The main objective of this study was to analyze the factors affecting inflation in Indonesia in 2000.1-2011.4 period. The variables used are: gross domestic product (GDP), the money supply in a broad sense (M2), interest rate, Bank Indonesia certificates (SBI), and the exchange rate of rupiah against the U.S. dollar.

The data used in this study is time series data in the quarterly period from 2000.1 to 2011.4, using multiple linear regression with the method of Ordinary Least Square (OLS).

The results of this analysis states that the variable gross domestic product and the SBI rate are positive and significant effect on inflation. While exchange rate are positive and not significant effect on inflation. In the other hand, the variables in the money supply (M2) is negative and significant effect on inflation in the quarter a year of research.

Keyword: GDP, M2, SBI rate, Exchange rate

ABSTRAKSI

Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada negara sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan adalah bagaimana negara tersebut memelihara kestabilan dan pertumbuhan ekonominya. Kestabilan ekonomi menyangkut segi kestabilan tingkat harga, tingkat pendapatan nasional, dan pertumbuhan kesempatan kerja. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode 2000.1-2011.4. Variabel yang digunakan antara lain : produk domestik bruto (PDB), jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI), dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam periode kuartalan dari tahun 2000.1 sampai dengan 2011.4, menggunakan regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil analisis ini menyebutkan bahwa variabel produk domestik bruto dan suku bunga SBI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan variabel kurs berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Di sisi lain variabel jumlah uang beredar (M2) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inflasi pada kuartal tahun penelitian.

Kata Kunci: PDB, M2, SBI, Kurs

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahman dan Rahim-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan akhir dari suatu proses belajar di bangku kuliah, akan tetapi merupakan awal babak baru yang harus penulis tempuh.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak hanya kepada semua pihak yang turut membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini, namun juga selama menjalani kuliah. Ucapan terima kasih tersebut saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis
2. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Maruto Umar Basuki, SE, MSi selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing penulis. Terima kasih atas saran, kritik, diskusi serta perhatiannya selama penulis menyelesaikan skripsi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
4. Bapak Arif Pujiyono, SE., M.Si. selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani kuliah. Terima kasih atas saran, kritik serta perhatiannya selama penulis menyelesaikan kuliah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan IESP, Manajemen dan Akuntansi, terima kasih atas ilmu, pengalaman, bimbingan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan bisnis UNDIP
6. Staf administrasi dan para karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP yang banyak membantu penulis.
7. Kedua orang tua penulis bapak Hari Nugroho dan ibu Moerdiati terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang dan doanya yang tiada

terputus pada ananda. Alhamdulillah akhirnya dapat menyelesaikan kuliah. Semoga Allah SWT meridhoi niat ananda untuk membalas semua kasih sayang serta doa bapak dan ibu.

8. Kepada kakakku Anto, teruskan perjuangan selalu semoga sukses.
9. Windy, yang tanpa bosan selalu memberi kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keceriaan, canda tawa, dan doa.
10. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Ekonomi UNDIP (Tara, Sabun, Tomo, Ega, Ruben, Endy, Gary, Titi, Tika, Ita, Bajay, Desy, Shabrina, Agung, Osti, Salmon, Demon, Said, Roy, Anggit, Putra, Wiwit, Pagsi, Afif, Ayiph, Bertha, Lamhot, Arif, Danang, Fikri, Hemu, Paman Bete) dan lain-lain yang belum bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kerja sama, pengalaman, ilmu, perhatian dan pengertian yang telah diberikan kepada penulis.
11. Kawan-kawan di jurusan IESP terima kasih atas kerjasama, pengalaman, canda tawa, kritik dan nasehatnya.
12. Teguh dan Tika terima kasih atas bantuan jurnal, modul dan skripsinya yang menginspirasi penulis sehingga bisa menulis skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semuanya.

Akhirnya, segala kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan skripsi ini adalah tanggung jawab penulis. Namun, apabila terdapat kebenaran dalam skripsi ini semata hanya keridhoan Allah SWT Sang Maha Sempurna. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 30 Juli 2012

Primawan Wisda Nugroho
C2B005195

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAC.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Definisi Inflasi.....	15
2.1.2 Indikator Inflasi.....	17
2.1.3 Teori Inflasi.....	19
2.1.3.1 Jenis Inflasi Menurut Sifatnya.....	19
2.1.3.2 Jenis Inflasi Menurut Sebab Terjadinya.....	20
2.1.3.3 Jenis Inflasi Menurut Asal Dari Inflasi.....	23
2.1.4 Teori Inflasi.....	24
2.1.5 Dampak Inflasi.....	31
2.1.6 Pengertian Uang.....	33
2.1.7 Teori Permintaan Agregat dan Tingkat Harga.....	34
2.1.7.1 <i>Keynes Effect</i>	34

2.1.7.2 <i>Pigou Effect</i>	37
2.1.7.3 <i>Keynes Effect, Pigou Effect,</i> dan Permintaan Agregat.....	40
2.1.7.4 Bentuk Kurva Permintaan Agregat.....	43
2.1.8 Kebijakan Moneter.....	46
2.1.8.1 Definisi Kebijakan Moneter.....	46
2.1.8.2 Instrumen Kebijakan Moneter.....	47
2.1.9 Inflasi dan Nilai tukar.....	51
2.2 Penelitian Terdahulu	53
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	57
2.4 Hipotesa.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Variabel Penelitian	61
3.2 Definisi Variabel Operasional.....	61
3.2.1 Variabel Dependen	61
3.2.2 Variabel Independen.....	62
3.3. Metode Analisis Data.....	63
3.3.1 Pengujian Hipotesa.....	63
3.3.1.1 Uji Signifikansi Parameter (uji t).....	63
3.3.1.2 Uji Signifikansi Simultan (uji f).....	64
3.3.1.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	65
3.3.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	66
3.3.2.1 Deteksi Normalitas.....	66
3.3.2.2 Deteksi Multikolinearitas.....	67
3.3.2.3. Deteksi Autokorelasi.....	67
3.3.2.4 Deteksi Heterokedastisitas.....	68
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	70
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	70
4.1.1 Perkembangan Inflasi Di Indonesia.....	70
4.1.2 Perkembangan Produk Domestik Bruto.....	76
4.1.3 Perkembangan Jumlah Uang Beredar.	82

4.1.4	Perkembangan Suku Bunga SBI.....	85
4.1.5	Perkembangan Kurs rupiah terhadap dollar Amerika	89
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	93
4.2.1	Pengujian Asumsi Klasik	93
4.2.1.1	Deteksi Normalitas.....	93
4.2.1.2	Deteksi Multikolinearitas.....	94
4.2.1.3	Deteksi Heterokedastisitas.....	95
4.2.1.4	Deteksi Autokorelasi.....	97
4.2.2	Uji Stastistik	98
4.2.2.1	Koefisien Determinasi (R ²).....	98
4.2.2.2	Uji Signifikansi Simultan (uji f).....	99
4.2.2.3	Uji Signifikansi Parameter (uji t).....	99
4.2.3	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	100
BAB V	PENUTUP.....	103
5.1	Simpulan	103
5.2	Saran.....	104
	Daftar Pustaka	105
	Lampiran-lampiran.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1997 – 2011 (persen)	4
Tabel 1.2	Perbandingan Inflasi, Jumlah Uang Beredar (M2), dan Pertumbuhan JUB tahun 1997-2006.....	8
Tabel 1.3	Perbandingan Inflasi dan Nilai Tukar tahun 1997-2011	9
Tabel 4.1	Pertumbuhan dan Distribusi PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2002-2008 (dalam persen).....	78
Tabel 4.2	Koefisien Korelasi Antar Variabel Independen.....	95
Tabel 4.3	Deteksi White.....	96
Tabel 4.4	Deteksi Lagrange Multiplier.....	97
Tabel 4.5	Koefisien Determinasi.....	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Bunga Indonesia dan Tingkat Bunga Dunia Periode 2000.2 – 2008.....	10
Gambar 2.1 <i>Inflationary Gap</i>	20
Gambar 2.2 <i>Demand Pull Inflation</i>	21
Gambar 2.3 <i>Cost Push Inflation</i>	22
Gambar 2.4 Inflasi timbul karena adanya <i>Inflationary Gap</i>	29
Gambar 2.5 Inflasi berhenti karena <i>Inflationary Gap</i> mengecil.....	29
Gambar 2.6 Keynes Effect dan Kurva Permintaan Agregat.....	36
Gambar 2.7 <i>Pigou Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat.....	39
Gambar 2.8 <i>Keynes Effect, Pigou Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat..	42
Gambar 2.9 Bentuk Kurva Permintaan Agregatif: Asumsi Klasik Lawan Asumsi Keynes.....	43
Gambar 2.10 Bentuk Kurva Permintaan Agregatif dengan Adanya Jerat Likuiditas.....	45
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A	Uji Normalitas..... 107
Lampiran B	Uji Multikolinearitas..... 108
Lampiran C	Uji Heterokedastisitas..... 109
Lampiran D	Uji Autokorelasi..... 110
Lampiran E	Koefisien Determinasi..... 111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, bahkan distribusi pendapatan. (Susanti dkk, 1995:41).

Inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Banyak kajian membahas inflasi, tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian (Baasir, 2003:265).

Krisis ekonomi yang dipicu oleh gejolak nilai tukar rupiah telah berdampak sangat luas pada seluruh sendi perekonomian dan tatanan kehidupan (Anwar Nasution, 2001). Krisis ekonomi yang telah terjadi, paling tidak dalam konteks ini, memberikan pelajaran yang berharga akan pentingnya penciptaan kestabilan moneter (kestabilan nilai rupiah) sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Achyar Ilyas, 1999).

Kesadaran untuk memetik hikmah dari pengalaman itu pula yang kemudian melahirkan persetujuan DPR atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter (Anwar Nasution, 2001). Undang-Undang Bank Sentral Indonesia yang baru ini, memiliki muatan substansi yang berbeda dalam hal penanganan kebijakan moneter di Indonesia dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Perbedaan tersebut salah satunya adalah pada sasaran akhir kebijakan moneter yang lebih diarahkan untuk menjaga inflasi (Achyar Ilyas dalam Didik J Rachbini dkk, 2000). Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, di mana banyak bank sentral yang telah beralih lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap agregat makro ekonomi. Pertama, inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap aset finansial domestik menjadi rendah (bahkan seringkali negatif), sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi. Kedua, inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri. Ketiga, inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumber daya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen. Keempat, inflasi yang tinggi dapat

mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri. Kelima, inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (Hera Susanti dkk, 1995).

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 1990-an, laju inflasi di Indonesia memang cukup tinggi, terlebih-lebih selama krisis moneter. Pada tahun 1997, tingginya tingkat inflasi Indonesia disebabkan karena terjadinya krisis moneter yang melanda beberapa negara Asia. Soedrajat Djiwandono dalam Agustinus Suryantoro (2000) menyatakan bahwa krisis nilai tukar di Thailand menyebar cepat ke negara-negara Asia lain termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya *contagion effect* atau efek berantai sebagai akibat terintegrasinya pasar domestik ke dalam pasar keuangan global. Kondisi lebih buruk terjadi dalam perekonomian Indonesia, dimana krisis tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia, yakni penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Tahun 1997 – 2011 (persen)

Tahun	Inflasi (Persen)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1997	11,05	4,65
1998	77.63	-13,1
1999	2.01	0,79
2000	9.35	4,92
2001	12.55	3,45
2002	10.03	3,69
2003	5.06	4,1
2004	6.40	5,1
2005	17.11	5,6
2006	6.60	6,1
2007	6.59	5,8
2008	11.06	5,3
2009	2.78	5,4
2010	6.96	6,9
2011	3,79	6,5

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 1997-2011

Krisis ekonomi juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara disertai dengan peningkatan inflasi. Munculnya inflasi tahun 1997 di Indonesia menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi secara signifikan. Imbas dari pada krisis ekonomi 1997 paling dirasakan dampaknya pada tahun 1998, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai kontraksi dengan pertumbuhan minus 13,3%, *hyperinflasi* juga terjadi di Indonesia dengan tingkat inflasi 77, 63%. Selanjutnya pada tahun 1999, laju inflasi sudah dapat dikendalikan seiring dengan membaiknya kondisi moneter di Indonesia menjadi sebesar 2,01%. Memasuki tahun 2000 stabilitas moneter cukup terkendali dengan tingkat inflasi sebesar 9,35% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%. Dalam perkembangannya setiap tahun inflasi terus berfluktuasi hingga mencapai angka

tertinggi sebesar 17,11% pada tahun 2005 dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,1%. Inflasi dalam perkembangannya menunjukkan angka yang meningkat mencapai di atas 11% pada akhir 2008 dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka sekitar 5,3%. Inflasi sempat menurun hingga kisaran 2-3% pada 2009, tetapi kemudian meningkat lagi pada level 6,96% di akhir tahun 2010. Melanjutkan perkembangan di akhir tahun 2010, selama triwulan I 2011 inflasi masih berada di level yang tinggi, mendekati 7%, yang antara lain dipicu oleh tingginya inflasi *volatile food* dan inflasi inti. Laju inflasi Indonesia sepanjang tahun 2011 tercatat sebesar 3,79 persen dimana perekonomian tumbuh sebesar 6,5%.

Inflasi sering diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus, dalam waktu dan tempat tertentu (Korteweg, 1973; Ackley, 1978; Nopirin, 1997; serta Boediono, 2001). Keberadaannya sering diartikan sebagai salah satu masalah utama dalam perekonomian negara, selain pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Inflasi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Karena dengan penghasilan yang relatif tetap, mereka tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga yang disebabkan karena inflasi. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dinamis (pedagang dan pengusaha misalnya), seringkali mendapat manfaat dari adanya kenaikan harga tersebut, dengan cara menyesuaikan harga jual produknya. Dengan demikian pendapatan yang mereka peroleh secara otomatis akan tersesuaikan, dan tidak jarang dengan persentase yang lebih besar. Didalam

penjelasannya, Nopirin (2000: 32), menyebut dampak pertama ini dengan sebutan efek terhadap pendapatan (*Equity Effect*).

Inflasi dapat menurunkan nilai tabungan masyarakat, sehingga masyarakat akan cenderung memilih menginvestasikan dananya dalam aktiva yang lebih baik. Dengan kecenderungan ini, dunia perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas, dan sebagai salah satu sumber perolehan dana bagi sektor riil, hal ini tentu tidak menguntungkan. Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. Misalnya, di sektor perdagangan luar negeri, komoditi ekspor Indonesia menjadi kurang dapat bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia. Dengan kata lain, kemerosotan produksi akan terjadi, baik untuk produk yang berorientasi ekspor maupun produk untuk pasar domestik. Hal ini sangat berbahaya karena dapat memicu meningkatnya pengangguran di suatu negara (Khalwaty, 2000: 33), dan juga (Korteweg, 1973).

Di sisi kurs valuta asing, Rupiah akan semakin terdepresiasi terhadap mata uang asing, yang pada gilirannya akan menimbulkan masalah lain yang tidak kalah seriusnya, seperti membengkaknya kewajiban pemerintah terhadap kreditur luar negeri. Menurut Harvey (1988: 354) inflasi akan mempengaruhi kinerja perdagangan suatu negara yang tercermin dalam neraca perdagangannya. Terakhir, inflasi yang tidak terkendali dapat mendorong terjadinya *capital outflow* ke luar negeri. Pemilik modal akan lebih memilih menginvestasikan dananya di negara yang lebih menguntungkan. Begitu pula akan terjadi relokasi sektor manufaktur / riil ke negara yang memiliki *cost production* yang lebih rendah.

Bank Indonesia, sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi di Indonesia mempunyai tugas yang tidak mudah, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Suatu perekonomian dapat dikatakan stabil salah satunya indikatornya adalah apabila inflasi ini dapat dikendalikan dalam *range* yang moderat. Dan bila hal itu tercapai maka hal itu merupakan kesuksesan dari sebuah lembaga pemegang otoritas moneter tertinggi. Kestabilan ini sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Perekonomian tidak dapat bertumbuh dan mencapai kemapanan apabila kestabilan ekonomi tidak bisa diraih. Kita memang tidak bisa melimpahkan semua masalah stabilisasi ekonomi ini kepada bank sentral, namun setidaknya dengan berbagai *power* dan kewenangan yang dimilikinya, Bank Indonesia seyogyanya mampu berbuat banyak untuk menjalankan fungsi stabilisasi yang amat krusial bagi pembangunan ini.

Penempatan inflasi sebagai sasaran akhir, tidak berarti Bank Indonesia mengabaikan sasaran makro ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Justru pengendalian inflasi tersebut dimaksudkan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja pada tingkat kapasitas penuh. Disamping itu, mengingat adanya *trade-off* jangka pendek antara inflasi dan pertumbuhan, mentargetkan inflasi secara otomatis identik dengan mentargetkan pertumbuhan, dengan kata lain, dalam menetapkan target inflasi, Bank Indonesia sudah mempertimbangkan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai dengan tingkat inflasi tersebut.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah uang beredar M2 (*broad money*) terus mengalami peningkatan jumlah dari 1997 hingga 2006. Hal ini dapat menjadi

indikasi bahwa perubahan jumlah uang beredar di Indonesia menyebabkan perubahan yang proporsional terhadap inflasi. Dapat diartikan bahwa perubahan tingkat inflasi di Indonesia sebagai akibat perubahan harga dalam periode tersebut cukup banyak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar.

Tabel 1.2
**Perbandingan Inflasi, Jumlah Uang Beredar (M2),
dan Pertumbuhan JUB tahun 1997-2006**

Tahun	Inflasi (Persen)	JUB (M2) (Trilyun Rupiah)	Pertumbuhan JUB (Persen)
1997	11,05	355,64	23,2
1998	77,63	577,38	62,4
1999	2,01	646,21	11,9
2000	9,35	747,03	15,6
2001	12,55	844,05	13,0
2002	10,03	883,91	4,7
2003	5,06	955,69	8,1
2004	6,40	1033,53	8,1
2005	17,11	1203,22	16,4
2006	6,60	1382,07	14,9

Sumber: Key Indicators 2006 dan 2007, ADB

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah mengarahkan pada diadopsinya sistem nilai tukar mengambang atau *free floating exchange rate* (Suryanto, 2003). Indonesia telah beberapa kali menerapkan

kebijakan tentang nilai tukar rupiah dan terakhir pada 14 Agustus 1997, Indonesia menerapkan nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*) yang artinya nilai tukar Rupiah sepenuhnya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran valas di pasar valas. Setelah melepaskan BI band intervensi pada Agustus 1997, kurs rupiah terus terkoreksi dengan terdepresiasinya kurs rupiah hampir 100 persen terhadap Dollar Amerika. Dalam rentang waktu satu dekade semenjak diberlakukannya *free floating exchange rate* posisi terendah (depresiasi rupiah) kurs rata-rata tahunan adalah pada tahun 2001, dengan rata-rata Rp 10.400,00/USD, seperti terlihat dalam tabel 1.3 berikut:

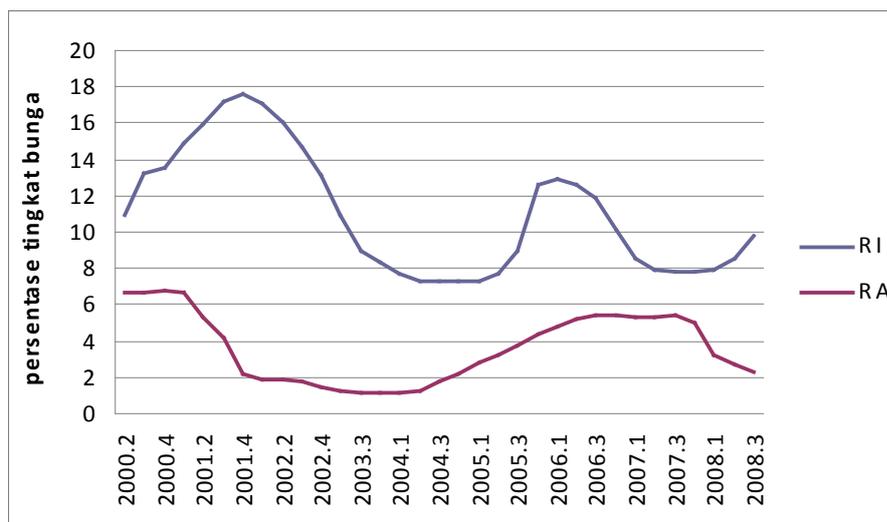
Tabel 1.3
Perbandingan Inflasi dan Nilai Tukar tahun 1997-2011

Tahun	Inflasi (Persen)	Nilai Tukar (Rupiah/US Dollar)
1997	11,05	4650
1998	77.63	8025
1999	2.01	7085
2000	9.35	9595
2001	12.55	10400
2002	10.03	8940
2003	5.06	8465
2004	6.40	9290
2005	17.11	9830
2006	6.60	9020
2007	6.59	9416
2008	11.06	10950
2009	2.78	9400
2010	6.96	8991
2011	3,79	9068

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 1997-2011

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa tingkat bunga Indonesia (tingkat bunga SBI 1 bulanan) dalam grafik di simbolkan dengan RI dan tingkat bunga dunia (suku bunga LIBOR 1 bulanan) dalam grafik disimbolkan dengan RA terlihat perbedaan fluktuasinya. Tingkat bunga Indonesia (RI) cenderung tinggi dengan rata-rata 11,05394 persen dan tingkat bunga dunia cenderung berfluktuasi pada kisaran yang lebih rendah dengan rata-rata 3,625758 persen. Perbedaan tingkat bunga Indonesia dan luar negeri juga dapat diketahui dengan melakukan uji beda varian, dimana varian untuk tingkat bunga dunia sebesar 11,50736 dan varian tingkat bunga dunia sebesar 9,4178 (Sumber: Bank Indonesia, diolah).

Gambar 1.1:
Perbandingan Tingkat Bunga Indonesia dan Tingkat Bunga Dunia
Periode 2000.2 – 2008.3



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI), berbagai edisi diolah

Menurut Mankiw (2007), perbedaan tingkat bunga internasional dan domestik disebabkan oleh dua alasan, pertama: Resiko negara yang dicerminkan

oleh resiko politik karena memberi pinjaman disebuah Negara, dan kedua: perubahan yang diharapkan dalam kurs riil. Ekspektasi bahwa mata uang akan kehilangan nilainya di masa depan akan menyebabkan mata uang itu kehilangan nilainya saat ini. Sehingga tingkat bunga domestik ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah dengan resiko politik. ($r = r^* + \theta$).

Perkembangan inflasi pada masa sebelum terjadinya krisis moneter cukup berimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini peningkatan pada jumlah uang beredar diakibatkan defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang dan pinjaman luar negeri yang semakin besar sehingga dapat dikatakan sektor moneter merupakan penyebab munculnya inflasi. Faktor penyebab inflasi disebabkan ekspansi yang cepat dalam jumlah uang beredar diakibatkan besarnya defisit anggaran pemerintah secara terus menerus guna membiayai pembangunan padahal penerimaan pajak tidak mencukupi. Namun setelah terjadinya krisis moneter inflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh *imported inflation* yaitu naiknya biaya produksi dimana sebagian besar proses produksi memiliki kandungan impor yang cukup tinggi seperti mesin-mesin produksi dan terpuruknya rupiah makin memicu tingginya inflasi di Indonesia.

Berfluktuasinya tingkat inflasi di Indonesia dengan beragam faktor yang mempengaruhi mengakibatkan semakin sulitnya pengendalian inflasi, sehingga dalam pengendaliannya pemerintah harus mengetahui faktor-faktor pembentuk inflasi. Inflasi di Indonesia bukan saja merupakan fenomena jangka pendek, seperti dalam teori kuantitas dan teori inflasi Keynes, tetapi juga merupakan fenomena jangka panjang (Baasir, 2003:267).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah adanya laju inflasi yang relatif tinggi di Indonesia terlebih selama dan setelah terjadinya krisis moneter, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi fluktuasi pembentuk inflasi. Pembahasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi yang terdiri dari variabel-variabel domestik yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Jumlah Uang Beredar (M2), serta dari variabel eksternal adalah variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar (Kurs). Selanjutnya yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dari perubahan produk domestik bruto (PDB), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah uang beredar (M2) dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar (kurs) terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode 2000.1 - 2011.4.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh dari perubahan produk domestik bruto (PDB), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah uang beredar (M2) dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar (kurs) terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode 2000.1 – 2011.4.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaruh variabel yang mempengaruhi inflasi.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi instansi-instansi dalam menetapkan suatu kebijakan tentang pengendalian inflasi di dalam negeri.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan dan bab penutup yang mana masing-masing bab dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah mengenai pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori, konsep-konsep yang berkaitan dengan inflasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi pembanding bagi penelitian ini. Pada bab ini juga dibahas mengenai kerangka pemikiran yang akan memperjelas arah penelitian. Hipotesis penelitian akan dijelaskan pada bagian akhir dari bab ini.

BAB III, merupakan bab metode penelitian yang menguraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV, merupakan bab hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Inflasi

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman definisi (pengertian) tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan persepsi tentang inflasi. Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi suatu fenomena dan dilema ekonomi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi, (Nopirin, 2000).

Menurut Samuelson (1997:306), inflasi merupakan suatu kenaikan dalam tingkat harga umum dan laju inflasi adalah tingkat perubahan dari tingkat harga umum tersebut. Inflasi juga merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat serta jatuhnya nilai riil mata uang yang dinyatakan dalam persentase. Pengertian inflasi yang lain yaitu tingkat harga agregat naik atau inflasi adalah keadaan dimana harga barang pada umumnya mengalami kenaikan terutama disebabkan karena penawaran akan uang jauh melebihi permintaan akan uang. Sedangkan menurut Ackley dalam Iswardono (1993), inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi.

Dari sekian banyak pengertian inflasi tersebut, terdapat kesamaan prinsip bahwa inflasi merupakan suatu fenomena atau dilema ekonomi. Ada tiga aspek yang tercakup di dalam pengertian inflasi tersebut:

1. Adanya kecenderungan (*tendency*) harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus (*sustained*) yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.

3. Mencakup pengertian tingkat harga umum (*general level of prices*), yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga-harga secara umum.

Inflasi terjadi karena jumlah uang yang diedarkan melebihi jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat sehingga terdapat kelebihan dana di masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Jika harga umum mengalami kenaikan, maka daya beli masyarakat menjadi berkurang karena pendapatan riil masyarakat yang turun. Turunnya daya beli masyarakat suatu negara menggambarkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

2.1.2 Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur laju inflasi selama satu periode tertentu, diantaranya adalah :

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumers Price Index*)

Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Prinsip perhitungan inflasi berdasarkan IHK adalah sebagai berikut (Manurung, 2001:45) :

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\% \quad (2.1)$$

2. Indeks Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Indeks harga perdagangan besar atau yang lebih dikenal dengan indeks harga produsen melihat inflasi dari sisi produsen dan lebih menitikberatkan pada sejumlah barang di tingkat perdagangan besar. Ini berarti bahwa harga bahan mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi masuk dalam perhitungan. Ukuran yang dipakai dalam menghitung IHP adalah penjualan. Prinsip perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHPB} - \text{IHPB}_{-1})}{\text{IHPB}_{-1}} \times 100\% \quad (2.2)$$

3. GNP Deflator

Deflator GNP mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam perhitungan GNP. Deflator GNP diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas harga konstan) dan dengan demikian dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari seluruh komponen GNP (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto).

$$\text{Deflator GNP} = \frac{\text{GNP Riil}}{\text{GNP Nominal}} \times 100\% \quad (2.3)$$

2.1.3 Jenis Inflasi

2.1.3.1 Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Jenis inflasi menurut sifatnya dibagi menjadi (Nopirin, 1992) :

1. Inflasi merayap (*creeping inflation*)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

2. Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

3. Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

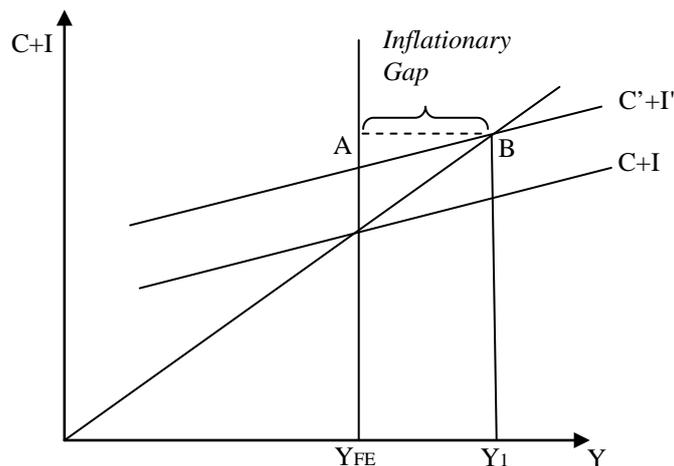
Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

2.1.3.2 Jenis Inflasi Menurut Sebab Terjadinya

1. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*). Sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan Inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya *inflationary gap*. *Inflationary gap* inilah yang akan menyebabkan inflasi. Secara grafik digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Inflationary Gap

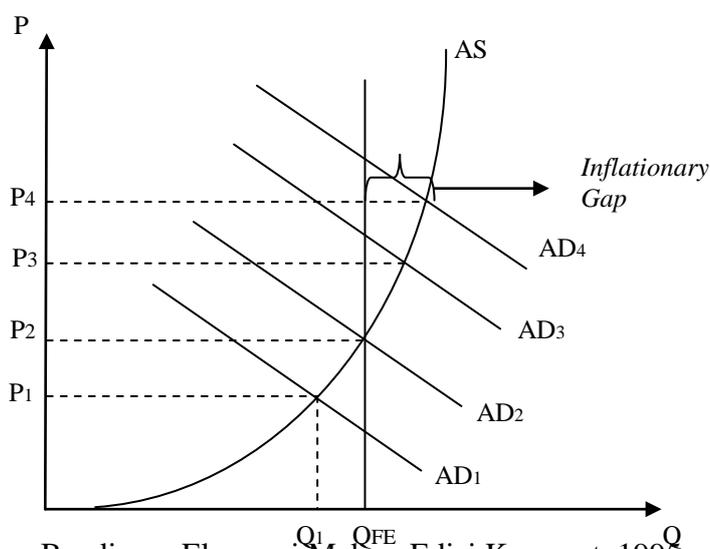


Sumber: Boediono, *Ekonomi Makro: Edisi Keempat*, 1995

Kenaikan pengeluaran total dari $C + I$ menjadi $C' + I'$ akan menyebabkan keseimbangan pada titik B berada di atas GNP full employment (YFE). Jarak A – B atau $YFE - Y_1$ menunjukkan besarnya *inflationary gap*.

Dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total proses terjadinya *demand-pull inflation* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Demand Pull Inflation



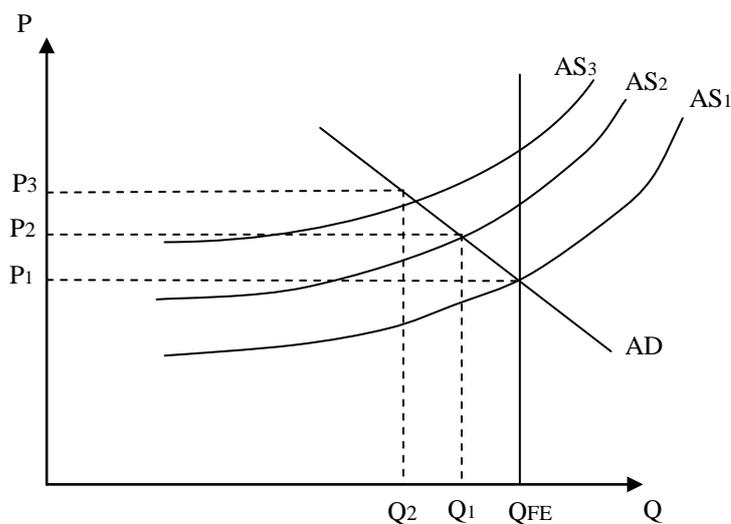
Sumber: Boediono, *Ekonomi Makro: Edisi Keempat*, 1995

Bermula dengan harga P_1 dan output Q_1 , kenaikan permintaan total dari AD_1 ke AD_2 menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga naik menjadi P_2 dan *output* naik menjadi Q_{FE} . Kenaikan AD_2 selanjutnya menjadi AD_3 menyebabkan harga naik menjadi P_3 , sedang *output* tetap pada Q_{FE} . Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya *inflationary gap*. Proses kenaikan harga ini akan berjalan terus sepanjang permintaan total terus naik (misalnya menjadi AD_4).

2. *Cost Push Inflation*

Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menaikkan harga dan menurunkan produksi. Serikat buruh yang menuntut kenaikan upah, manajer dalam pasar monopolistis yang dapat menentukan harga (yang lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, misalnya krisis minyak adalah faktor yang dapat menaikkan biaya produksi, atau terjadi penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Jika proses ini berlangsung terus maka timbul *cost push inflation*. Gambar 2.3 menjelaskan proses terjadinya *cost-push inflation*.

Gambar 2.3
Cost Push Inflation



Sumber: Boediono, *Ekonomi Makro: Edisi Keempat*, 1995

Bermula pada harga P1 dan QFE. Kenaikan biaya produksi (disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikan harga bahan baku untuk industri) akan menggeser kurva penawaran total dari AS1 menjadi AS2. konsekuensinya harga naik menjadi P2 dan produksi turun menjadi Q1. Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS3, harga naik dan produksi turun menjadi Q2.

Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan harga ini (yang sering dibarengi dengan turunnya produksi) disebut dengan *cost-push inflation*.

2.1.3.3 Jenis Inflasi Menurut Asal Dari Inflasi

Jenis inflasi menurut asal dari inflasi dibagi menjadi (Boediono, 1985):

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, gagal panen dan sebagainya.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Inflasi ini dapat terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri, sehingga dapat menyebabkan :

- a. Secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.

- b. Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang diimpor.
- c. Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.
- d.

2.1.4 Teori Inflasi

Secara garis besar teori mengenai inflasi ada tiga yaitu Teori Kuantitas (Teori Irving Fisher), Teori Keynes, dan Teori Strukturalis. Masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Untuk menerapkannya kita harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam keadaan penting di dalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok.

1. Teori Kuantitas (Teori Irving Fisher)

Teori ini adalah teori yang masih sangat berguna untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini lebih menyoroti peranan dalam proses terjadinya inflasi yang disebabkan dua faktor berikut:

- a. Jumlah uang beredar Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar (baik penambahan uang kartal maupun

- b. uang giral). Tanpa adanya kenaikan jumlah uang beredar maka tidak akan terjadi inflasi, meskipun terjadi kenaikan harga. Misalnya saja jika terjadi kegagalan panen, harga cenderung naik, namun kenaikan harga beras tersebut hanya sementara waktu saja dan tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Dengan demikian, bila jumlah uang beredar tidak ditambah lagi, inflasi akan berhenti dengan sendirinya.
- c. Ekspetasi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga.

Ada tiga kemungkinan keadaan :

- i. Pertama, bila masyarakat belum meramalkan harga-harga untuk naik pada waktu mendatang. Maka sebagian besar penambahan jumlah uang beredar akan diterima masyarakat untuk menambah uang kasnya yang berarti sebagian besar kenaikan jumlah uang beredar tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Hal ini menyebabkan tidak ada kenaikan permintaan dan tidak ada kenaikan harga barang-barang. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi dimulai dan masyarakat belum menyadari adanya inflasi
- ii. Kedua, dimana masyarakat mulai sadar akan adanya inflasi dan meramalkan adanya kenaikan harga barang-barang pada waktu mendatang. Penambahan jumlah uang beredar tidak lagi digunakan masyarakat untuk menambah uang kasnya melainkan untuk membeli barang. Hal ini dilakukan karena masyarakat ingin menghindari kerugian akibat memegang uang kas. Keadaan ini

berarti terdapat kenaikan permintaan barang-barang tersebut dan selanjutnya harga barang-barang tersebut akan meningkat.

iii. Ketiga, merupakan tahapan yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation* yang menaik)

iv.

2. Teori Keynes

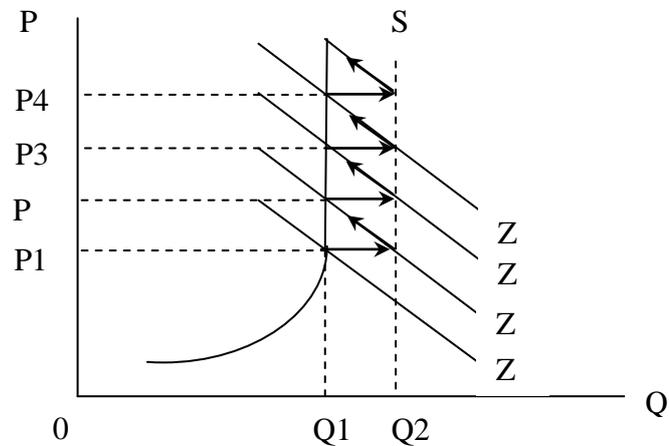
Menurut teori ini, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan demikian permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah yang tersedia. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui keinginannya dan menjadikan keinginan tersebut dalam bentuk permintaan yang efektif terhadap barang. Dengan kata lain, masyarakat berhasil memperoleh dana tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga golongan masyarakat ini bisa memperoleh barang dengan jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya. Tentunya tidak semua golongan ini misalnya masyarakat yang berpenghasilan tetap atau penghasilannya meningkat tidak secepat laju inflasi. Bila jumlah permintaan barang meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary gap* akan timbul. Keadaan ini menyebabkan harga-harga naik dan berarti rencana pembelian barang tidak dapat terpenuhi. Pada periode selanjutnya, masyarakat akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar

lagi (baik dari pencetakan uang baru maupun dari kredit pada bank dan permintaan kenaikan gaji). Proses inflasi akan tetap berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan masyarakat.

Gambar 2.4 menunjukkan keadaan dimana *inflationary gap* tetap timbul. Disini kita menganggap bahwa semua golongan masyarakat bisa memperoleh dana yang cukup untuk membiayai, pada harga yang berlaku, rencana-rencana pembelian mereka. Dengan timbulnya *inflationary gap* (misal, pemerintah memperbesar pengeluaran dengan mencetak uang baru), kurva permintaan efektif bergeser dari Z_1 ke Z_2 . *Inflationary gap* sebesar Q_1Q_2 timbul dan harga naik dari P_1 ke P_2 . Kenaikan harga ini mengakibatkan rencana-rencana pembelian golongan masyarakat (termasuk pemerintah sendiri) tidak terpenuhi. Karena jumlah barang-barang yang tersedia tidak bisa lebih besar lagi daripada OQ_1 , maka yang terjadi hanyalah realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan-golongan masyarakat lain dalam masyarakat kepada sektor pemerintah. Seandainya pada periode berikutnya golongan-golongan masyarakat lain tersebut bisa memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya yang lama dengan harga-harga baru yang lebih tinggi, dan pemerintah tetap pula berusaha memperoleh jumlah barang-barang seperti yang direncanakan pada periode sebelumnya dengan harga-harga baru yang lebih tinggi (dan disini perlu dicetak lagi uang baru), maka *inflationary gap* sebesar Q_1Q_2 akan timbul lagi. Harga akan naik lagi dari P_2 ke P_3 . Kalau setiap golongan masyarakat tetap berusaha memperoleh jumlah barang-barang yang sama dan mereka berhasil memperoleh dana untuk membiayai

rencana-rencana tersebut pada tingkat harga yang berlaku, maka *inflationary gap* akan tetap timbul pada periode-periode selanjutnya. Dalam hal ini harga-harga akan terus menerus menaik. Inflasi akan berhenti hanya bila salah satu golongan masyarakat tidak lagi (atau tidak bisa lagi) memperoleh dana untuk membiayai rencana pembelian barang-barang pada harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap* hilang). Perhatikan bahwa mereka yang “menang” dalam perebutan ini adalah mereka yang paling mudah untuk memperoleh dana tambahan untuk membiayai rencana pembelian mereka. Mereka yang tidak bisa dengan mudah memperoleh dana untuk membiayai rencana pembelian barang mereka dengan harga-harga yang baru (yang lebih tinggi) terpaksa harus menerima bagian yang lebih kecil dari barang-barang yang tersedia daripada bagian mereka sebelum proses inflasi terjadi. Secara umum mereka yang penghasilannya tidak naik secepat kenaikan harga-harga akan ketinggalan dan menerima bagian yang semakin kecil.

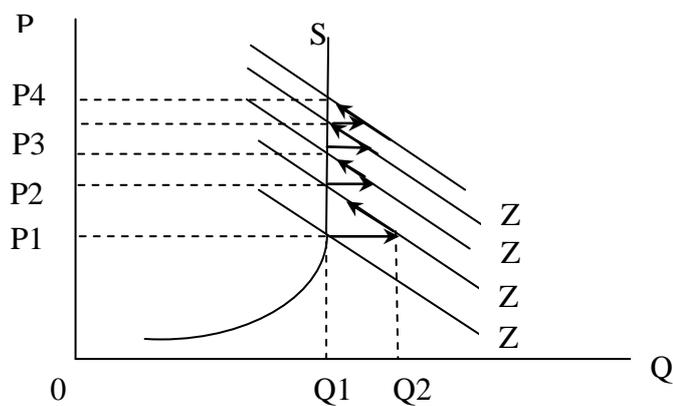
Gambar 2.4
Inflasi timbul karena adanya Inflationary Gap



Sumber: Boediono, Ekonomi Makro: Edisi Keempat, 1995

Gambar 2.5 menunjukkan proses inflasi yang akhirnya berhenti karena *inflationary gap* makin mengecil dan akhirnya hilang pada periode ke-lima. Harga menjadi stabil pada P5. Di balik proses ini beberapa golongan masyarakat menerima bagian *output* yang lebih kecil. Inflasi selalu diikuti dengan terjadinya redistribusi pendapatan.

Gambar 2.5
Inflasi berhenti karena Inflationary Gap mengecil



Sumber: Boediono, Ekonomi Makro: Edisi Keempat, 1995

3. Teori Strukturalis

Teori ini juga teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab munculnya inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi terutama yang terjadi di negara berkembang. Ada dua kekakuan/ketidakelastisan dalam perekonomian di negara berkembang yang menimbulkan inflasi yaitu:

a. Kekakuan dari penerimaan impor

Hal ini dikarenakan nilai ekspor tumbuh lebih kecil dari sektor lain dikarenakan harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut tidak menguntungkan atau dengan kata lain *term of trade* semakin memburuk. Hal lain yang menyebabkan ekspor tumbuh lebih kecil dari sektor lain adalah produksi barang-barang ekspor tidak elastis terhadap kenaikan harga. Hal ini akan mendorong pemerintah menggalakkan produksi dalam negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor (*import substitution strategy*)

b. Kekakuan penawaran bahan makanan di negara berkembang

Penawaran bahan makanan lebih lambat daripada pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga kenaikan harga bahan makanan dalam negeri cenderung untuk naik melebihi harga barang-barang lainnya. Akibatnya timbul tuntutan dari buruh untuk meminta upah yang lebih tinggi. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi. Kenaikan ongkos produksi akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang yang bersangkutan. Kenaikan harga barang-barang tersebut mendorong terjadinya inflasi yang dikenal dengan istilah *wage push inflation*.

2.1.5 Dampak Inflasi

Efek inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedang efek terhadap alokasi faktor produksi dan produk nasional masing-masing disebut *efficiency effect* dan *output effect*.

1. Efek terhadap pendapatan (*Equity Effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Pihak-pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang mendapatkan pendapatan tetap, orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas, demikian juga pihak yang memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari laju inflasi. Sedangkan pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari laju inflasi.

Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain.

2. Efek terhadap efisiensi (*Efficiency Effects*)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa

barang tertentu. Dengan adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan mengubah pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi. Namun kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

3. Efek terhadap output (*Output Effect*)

Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mengakibatkan sebaliknya, yakni penurunan *output*. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun secara drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan *output*. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan *output*, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

Intensitas efek inflasi ini berbeda-beda, apabila produksi barang ikut naik maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi, apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full employment*) intensitas efek inflasi semakin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*).

2.1.6 Pengertian Uang

Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar perdagangan (Sadono Sukirno, 2000). Teddy Herlambang dkk (2000) menyatakan bahwa definisi uang di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu semua uang kartal (uang kertas dan uang logam seperti yang dikenal masyarakat sehari-hari) dan uang giral (saldo-saldo rekening bank yang sewaktu-waktu dapat dipakai untuk pembayaran melalui cek, giro atau surat perintah lainnya). Uang kartal dan uang giral ini dalam istilah moneter disebut M1 atau disebut sebagai uang beredar dalam arti sempit. Penjelasan di atas dapat dirangkum melalui persamaan berikut:

$$M1 = \text{uang kartal} + \text{uang giral} \quad (2.4)$$

Disamping uang beredar dalam arti sempit, juga terdapat uang beredar dalam arti luas (M2) yang disebut juga sebagai likuiditas perekonomian. M2 merupakan penjumlahan dari M1 dan Uang kuasi (*Quasy Money*). Uang kuasi adalah uang yang tidak diedarkan. Uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Penjelasan di atas dapat dirangkum melalui persamaan berikut:

$$M2 = M1 + QM \quad (2.5)$$

Pengertian lain tentang uang yang perlu juga dipahami adalah uang primer (*reserve money/ M0*), yaitu uang yang diartikan sebagai uang yang diedarkan pemerintah yang dipegang oleh masyarakat dan bank-bank. Uang primer ini meliputi uang yang dipegang masyarakat sebagai alat bayar sehari-hari (uang

kartal) dan uang serap yang dimiliki bank (uang tunai di bank dan deposito di BI).

Penjelasan di atas dapat dirangkum melalui persamaan berikut:

$$M0 = \text{uang kartal} + \text{uang serap} \quad (2.6)$$

2.1.7 Teori Permintaan Agregat dan Tingkat Harga

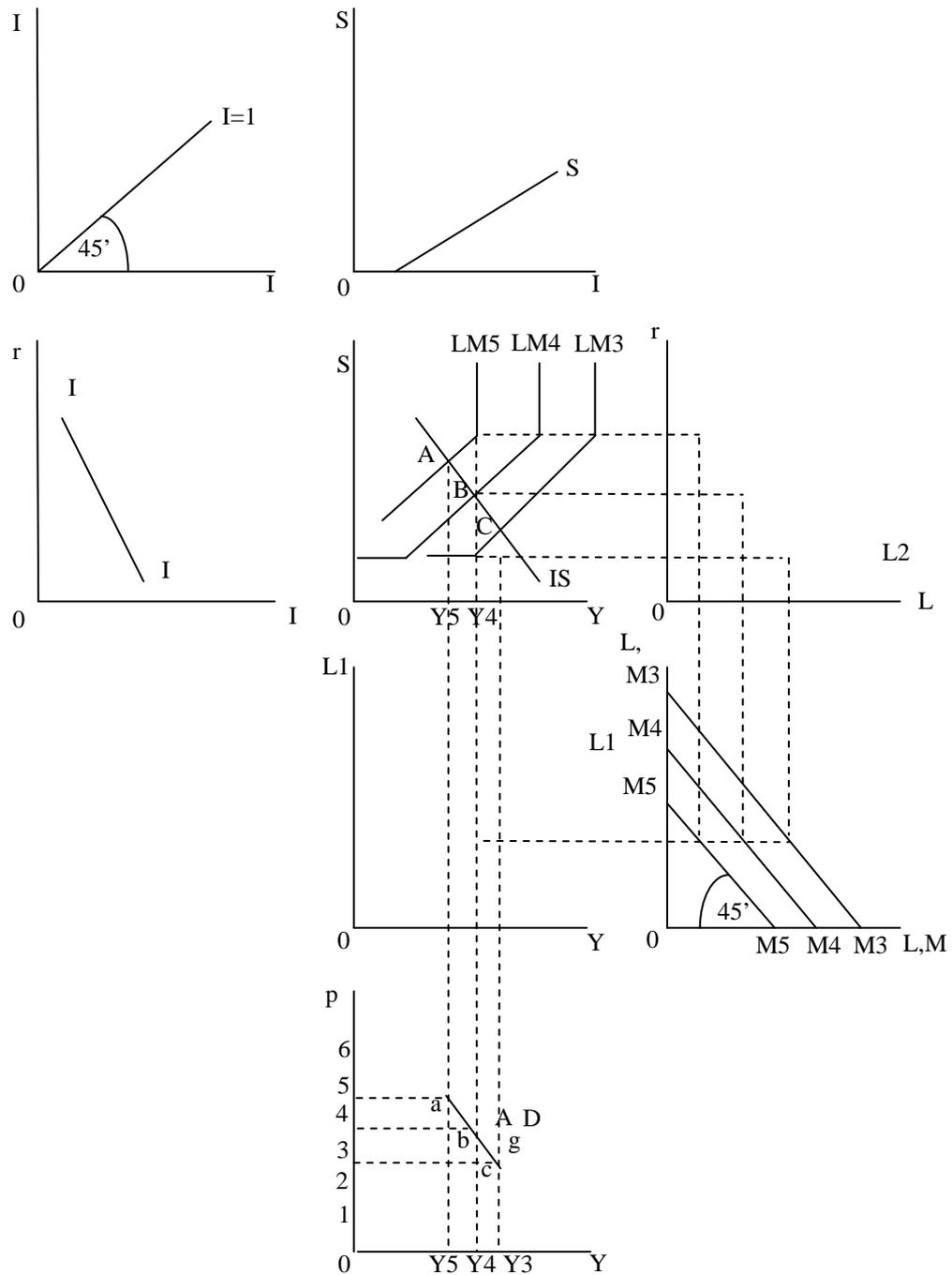
2.1.7.1 *Keynes Effect*

J.M Keynes melihat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional *equilibrium* melalui pengaruhnya terhadap *real money supply*, yang dapat pula disebut jumlah penawaran uang nyata. Dalam keadaan deflasi, yaitu di mana tingkat harga mengalami penurunan, nilai riil jumlah uang beredar akan mengalami peningkatan. Dengan jumlah uang yang nilai nominalnya sama dalam arti tidak berubah, menurunnya tingkat harga dengan lima puluh persen, misalnya mengakibatkan meningkatnya *real money supply* menjadi dua kali jumlah semula. Sebaliknya, sebagai akibat adanya inflasi, dengan *nominal money supply* yang sama dihasilkan *real money supply* yang lebih sedikit daripada sebelumnya (Soediyono, 2000).

Pada gambar 2.6, mula-mula tingkat harga setinggi 5. Dengan $P = 5$, *real money supply* tergambar sebagai garis penawaran uang $M5M5$. Dengan harga menurun menjadi $P = 4$, garis penawaran uang nyata bergeser ke $M4M4$. Selanjutnya apabila tingkat harga menurun lagi ke $P = 3$, garis *real money supply* bergeser lagi ke $M3M3$. Bergesernya garis *real supply* MM menjauhi titik sumbu silang 0 ini dengan sendirinya mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan, dari $LM5$ ke $LM4$ kemudian ke $LM3$. Dengan bergesernya kurva-kurva LM ini, maka titik equilibrium IS-LM juga pindah, yaitu semula A, kemudian pindah ke B, lalu

ke C (Soediyono, 2000). Dari uraian di atas, dapat dilihat hubungan antara tingkat harga dengan tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar barang dan pasar uang.

Gambar 2.6
Keynes Effect dan Kurva Permintaan Agregat



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

2.1.7.2 Pigou Effect

A.C Pigou dalam artikelnya yang sangat terkenal: “*The Classical Stationary State*”, mencoba menerangkan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi suatu perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai riil saldo kas masyarakat, yang biasa disebut juga *real cash balance*. Oleh karena itulah, kiranya mudah dipahami kalau konsepsinya tersebut terkenal dengan sebutan *Pigou real cash balance effect*, yang biasa juga hanya disingkat *Pigou Effect* (Soediyono, 2000).

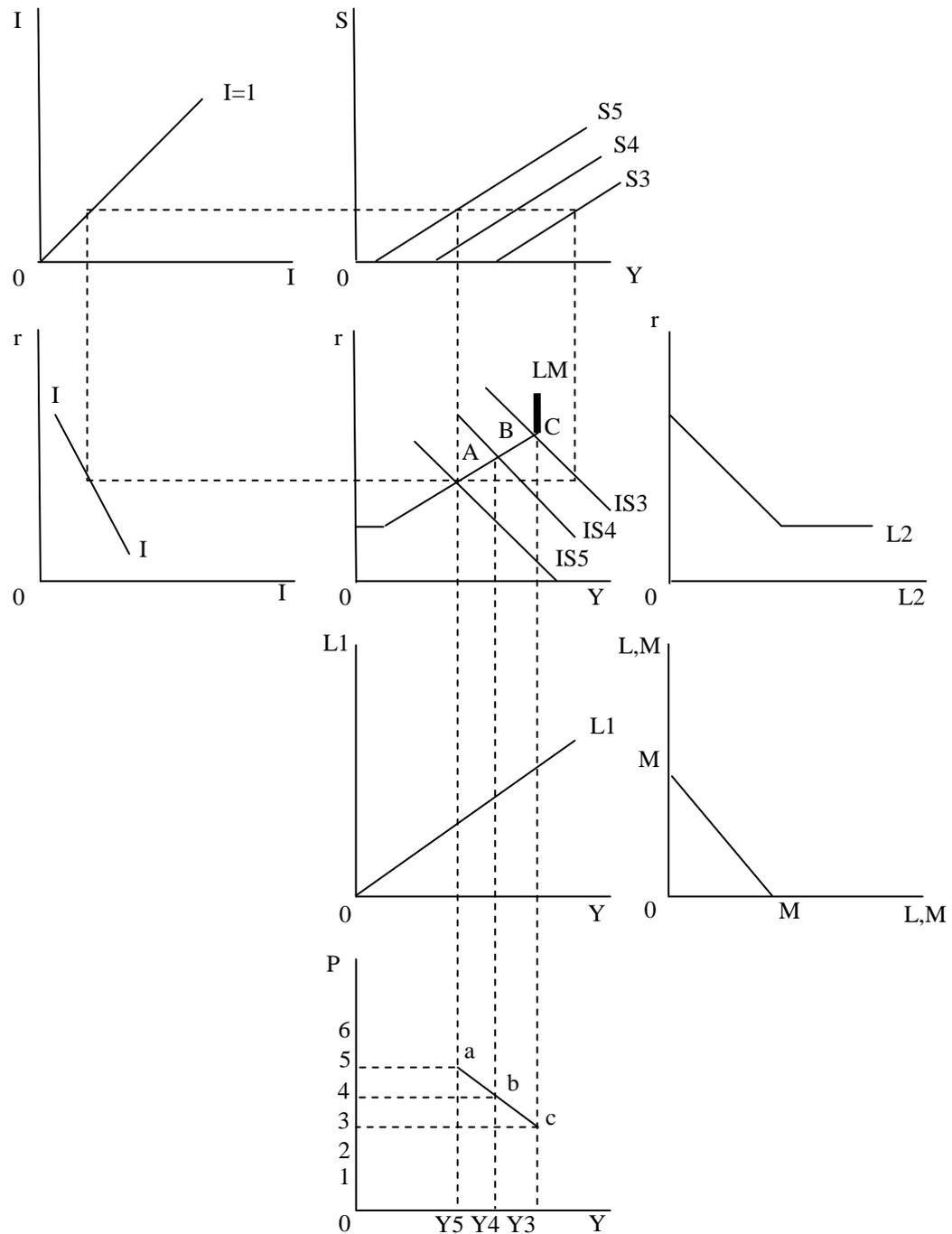
Dengan menurunnya tingkat harga, nilai riil saldo kas seseorang meningkat. Meningkatnya nilai riil saldo kas menyebabkan saldo kas yang semula berada dalam keadaan *ekuilibrium* oleh rumah tangga pemiliknya terasa terlalu banyak. Terjadilah sekarang keadaan *disekuilibrium* pada diri konsumen atau rumah tangga tersebut. Mereka ingin mengurangi saldo kasnya sampai pada jumlah yang optimal. Untuk maksud ini mereka akan menambah besarnya pengeluaran konsumsi (Soediyono, 2000).

Meningkatnya pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan yang sama secara grafik tercermin oleh bergesernya kurva atau garis konsumsi menjauhi sumbu pendapatan nasional. Ini berarti juga bahwa kurva atau garis *saving* bergeser mendekat ke sumbu pendapatan nasional. Atau lebih jelasnya variabel C_0 nilainya meningkat dan nilai S_0 menurun. Menurunnya nilai S_0 pada gambar 2.7 terungkap dalam bentuk bergesernya garis *saving*, misalnya dari S_5 ke S_4 , lalu ke S_3 (Soediyono, 2000). Bergesernya garis *saving* tersebut dengan sendirinya

akan mengakibatkan bergesernya kurva IS, dari semula IS5 bergeser ke IS4, lalu ke IS3.

Bergesernya kurva IS ini selanjutnya mengakibatkan pindahnya titik *ekuilibrium* IS-LM dari semula A, ke B, lalu ke C. Dengan pindahnya titik *ekuilibrium* IS-LM ini berarti tingkat pendapatan nasional *ekuilibrium* juga berubah dari semula OY5, menjadi OY4, kemudian berubah lagi menjadi OY3. Secara grafik kurva permintaan agregat pada gambar 2.7 berhasil diturunkan dari kuadran IS-LM. Hasilnya adalah kurva abc pada kuadran tengah paling bawah.

Gambar 2.7
Pigou Effect dan Kurva Permintaan Agregat



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

2.1.7.3 Keynes Effect, Pigou Effect, dan Permintaan Agregat

Setelah mengetahui bagaimana pengaruh *Keynes Effect* dan *Pigou Effect* mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat, dan disamping itu telah diketahui pula bagaimana kedua macam pengaruh tersebut secara sendiri-sendiri menghasilkan kurva permintaan agregat, adalah logis kalau dipermasalahkan juga bagaimana cara menurunkan kurva permintaan agregatif apabila dalam perekonomian *Keynes Effect* dan *Pigou Effect* bekerja berdampingan (Soediyono, 2000).

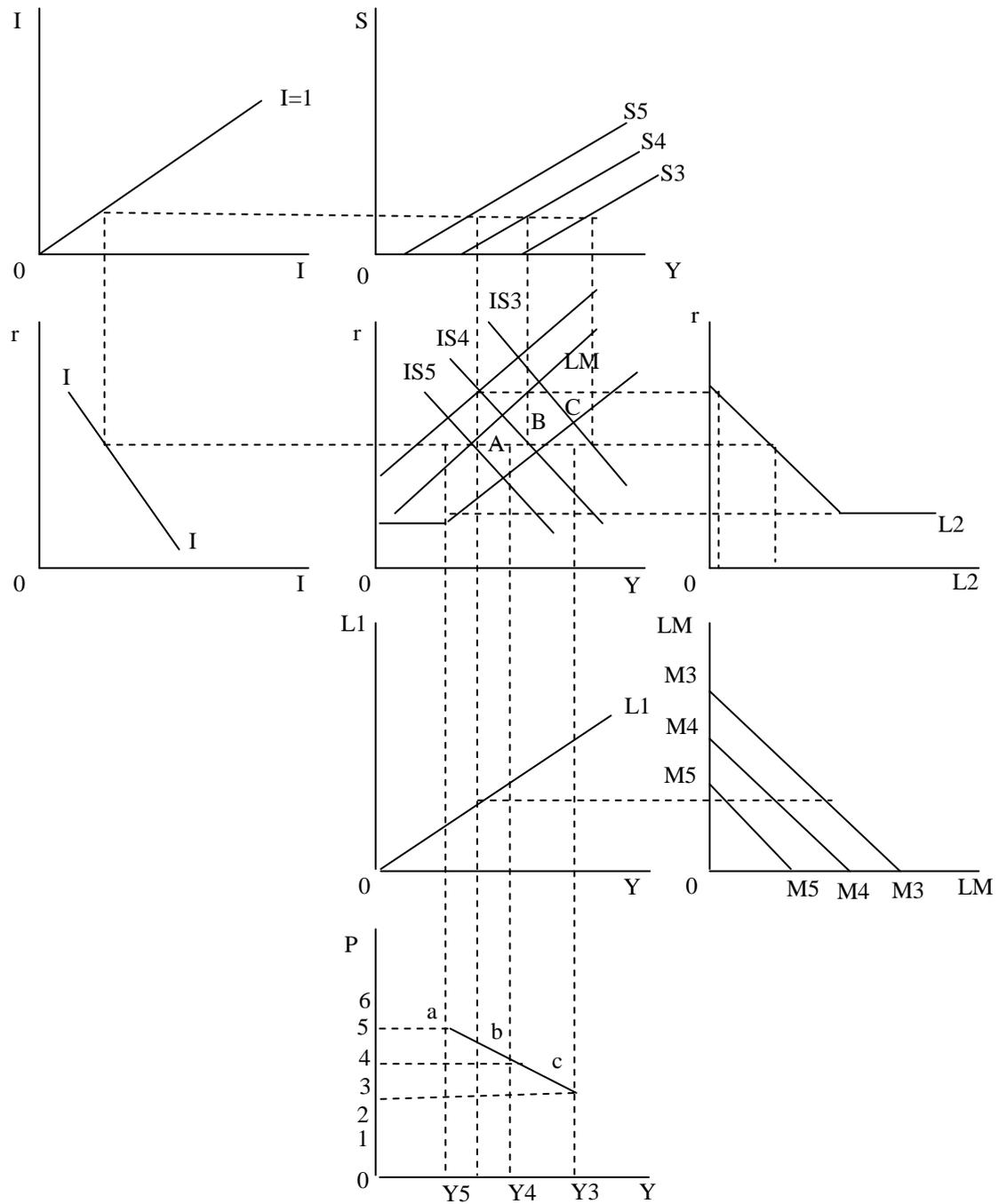
Telah diketahui bahwa adanya *Keynes effect* terlihat dalam bentuk bergesernya garis penawaran uang riil dari M5M5 ke M4M4 kemudian M3M3 sebagai akibat menurunnya tingkat harga dari semula 5, berubah menjadi 4, kemudian berubah lagi menjadi 3. Bergesernya kurva penawaran uang riil ini selanjutnya mengakibatkan bergesernya kurva LM, dari LM5 ke LM4 lalu ke LM3. *Pigou effect* di lain pihak terlihat dari bergesernya kurva IS dari IS5 ke IS4, kemudian IS3, yang diakibatkan oleh berubahnya tingkat harga yang sama, yaitu dari 5 ke 4 lalu ke 3 (Soediyono, 2000).

Setelah mengetahui pergeseran kurva IS dan LM, langkah selanjutnya adalah menemukan titik *ekuilibrium* IS-LM. Dalam mencoba menemukan titik-titik ekuilibrium tersebut perlu hati-hati. Sebab dengan tiga kemungkinan tingkat harga, sudah ditemukan sembilan titik potong IS-LM. Padahal untuk masing-masing tingkat harga hanya terdapat satu titik *ekuilibrium* IS-LM. Sebagai pegangan dalam menemukan titik *ekuilibrium* ISLM dapat diketengahkan bahwa hanya titik-titik potong kurva IS dengan kurva LM pada tingkat harga yang sama sajalah yang merupakan titik-titik *ekuilibrium* IS-LM. Dalam gambar 2.8, titik-

titik potong IS-LM yang merupakan titik-titik *ekuilibrium* IS-LM hanyalah titik-titik potong A, B, dan C (Soediyono, 2000).

Setelah menemukan titik-titik *ekuilibrium* IS-LM, langkah-langkah selanjutnya dalam menurunkan kurva permintaan agregat tidak berbeda dengan sebelumnya. Yaitu titik-titik *ekuilibrium* IS-LM A, B dan C di bawa ke kuadran tengah paling bawah, kuadran yang dapat kita sebut sebagai kuadran permintaan-penawaran agregatif, yang kemudian dari masing-masing titik tersebut ditempatkan pada tingkat harga masing-masing. Pada gambar 2.8, kurva permintaan agregat yang dihasilkan adalah kurva abc.

Gambar 2.8
Keynes Effect, Pigou Effect dan Kurva Permintaan Agregat

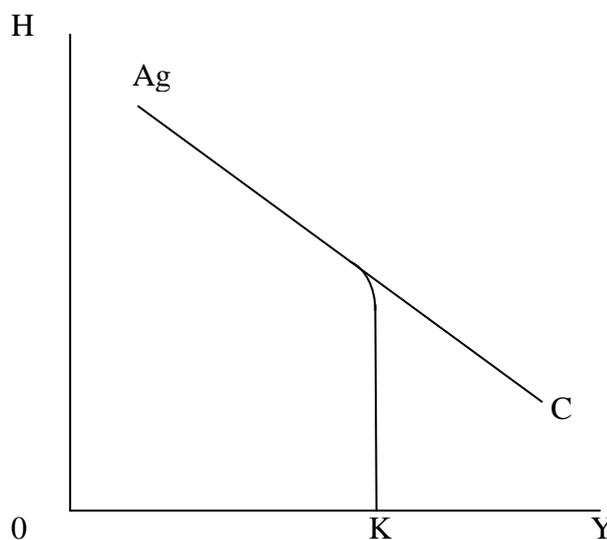


Sumber: Soediyono, *Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*, 2000

2.1.7.4 Bentuk Kurva Permintaan Agregat

Mudah dipahami kalau kurva permintaan agregat bentuknya dipengaruhi oleh bentuk kurva-kurva yang merupakan unsur daripada kurva permintaan agregat tersebut. Sehubungan dengan ini, dapat dibedakan antara bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi klasik dengan bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi Keynes.

Gambar 2.9
Bentuk Kurva Permintaan Agregatif:
Asumsi Klasik Lawan Asumsi Keynes



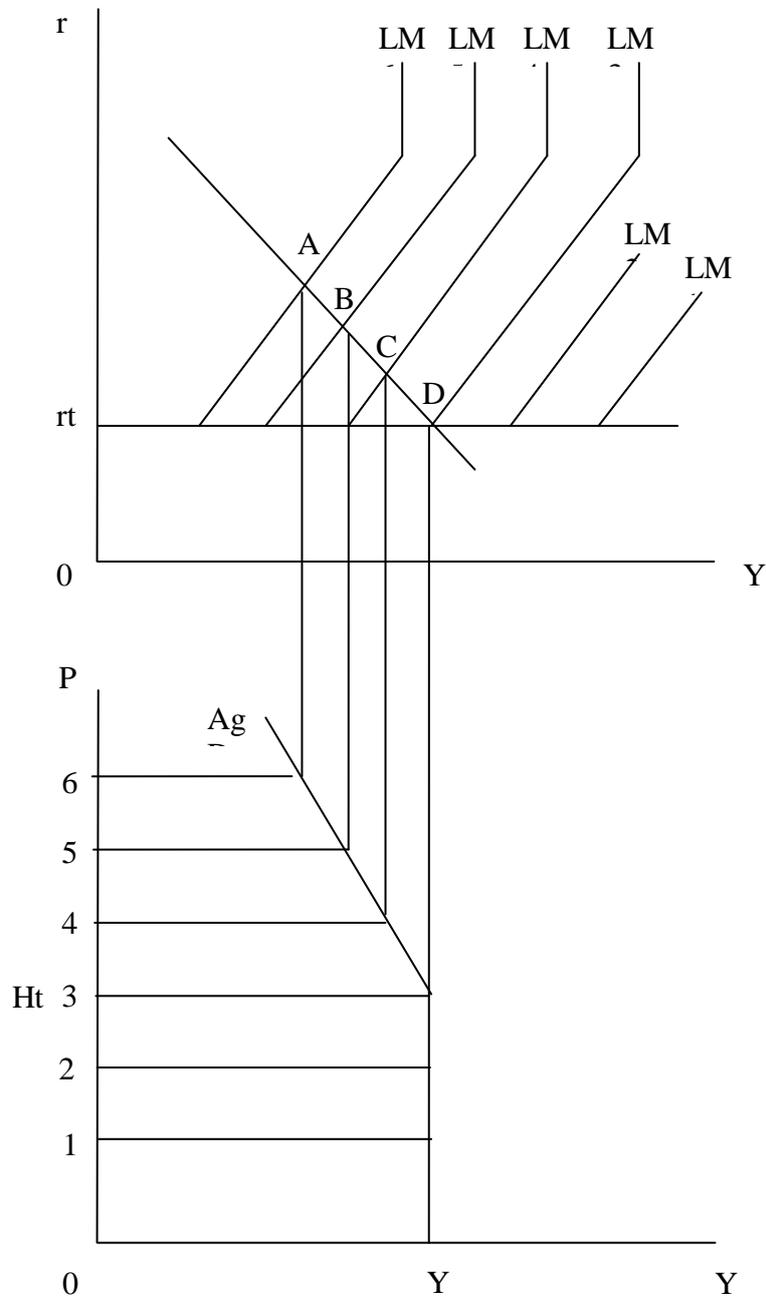
Sumber: Soediyono, *Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*, 2000

Pada gambar 2.9 di mana agDC merupakan kurva permintaan agregat dengan asumsi klasik, sedangkan agDK merupakan kurva permintaan agregat dengan asumsi Keynes.

Sebagai konsekuensi dipergunakannya asumsi adanya jerat likuiditas atau *liquidity trap* dan atau inelastis sempurnanya kurva permintaan investasi agregat pada bagian sebelah kanan kurva tersebut, maka kurva permintaan agregat dengan asumsi Keynes pada tingkat-tingkat harga yang tinggi bentuknya sama dengan bentuk yang dimiliki oleh kurva permintaan agregat dengan asumsi klasik. Tetapi mulai tingkat harga dengan kerendahan tertentu kurva permintaan agregat Keynes menurun lebih cepat dan bahkan akhirnya dapat sejajar dengan sumbu tingkat harga.

Sebaliknya dengan menggunakan asumsi-asumsi Klasik, yang boleh dikatakan tidak mengakui kemungkinan adanya *liquidity trap* dan fungsi permintaan Investasi dengan elastisitas yang sangat rendah, dihasilkan kurva permintaan agregat yang bentuknya seperti terlihat pada gambar 2.9, sebagai kurva agDC.

Gambar 2.10
Bentuk Kurva Permintaan Agregatif
dengan Adanya Jerat Likuiditas



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

Mengenai bagaimana *liquidity trap* menghasilkan kurva permintaan agregat yang inelastis sempurna dapat diuraikan dengan menggunakan gambar 2.10. Bekerjanya *Keynes effect* menggeser kurva LM ke kanan. Dalam contoh sebagai akibat menurunnya tingkat harga dari 6 ke 5, kemudian ke 4, dan seterusnya, kurva LM bergeser dari semula LM6 ke LM5, lalu ke LM4, dan seterusnya. Ini selanjutnya mengakibatkan titik ekuilibrium IS-LM pindah dari A ke B, kemudian ke C dan seterusnya.

Sekalipun kurva LM terus bergeser ke kanan sebagai akibat bekerjanya *Keynes effect*, namun sebagai akibatnya adanya *liquidity trap*, bergesernya titik equilibrium IS-LM akan "terjerat" pada titik D oleh jerat likuiditas atau *liquidity trap* tersebut. Dengan terjeratnya titik equilibrium IS-LM pada titik D, tingkat bunga tidak akan menurun lebih rendah daripada r_t , dan tingkat pendapatan nasional tidak akan melampaui Y_t . Selanjutnya hal ini mempunyai makna bahwa mulai dari tingkat harga 3 turun ke bawah, kurva permintaan agregat bergerak sejajar dengan sumbu harga.

2.1.8 Kebijakan Moneter

2.1.8.1 Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengawasi jumlah penawaran uang dalam masyarakat (Sukirno, 1994:43). Kebijakan moneter ini merupakan tindakan penguasa moneter (bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Jika keadaan ini terus berlangsung, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kondisi inilah yang melatar belakangi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang beredar di perekonomian melalui kebijakan moneter.

2.1.8.2 Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral.

Instrumen tidak langsung merupakan usaha untuk mengendalikan besaran moneter dengan cara mempengaruhi neraca bank sentral. Yang terpenting didalam instrumen tidak langsung adalah bank sentral dapat mempengaruhi posisi *base money* dan *bank reserve* yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kredit dan penawaran uang. Cara ini disebut tidak langsung karena dalam mencapai sasaran kebijakan bank sentral dapat mempengaruhi kondisi pasar uang melalui salah satu fungsinya sebagai badan yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan uang dengan mempengaruhi kondisi yang mendasari permintaan dan penawaran uang. Usaha untuk mengendalikan besaran moneter juga dilakukan dengan mempengaruhi neraca bank sentral sendiri, khususnya pada sisi pasiva, yaitu

reserve money yang pada gilirannya akan mempengaruhi suku bunga, kuantitas uang dan kredit di dalam keseluruhan sistem perbankan.

Adiwarman Karim (2002) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan berbagai kebijakannya, bank sentral menggunakan empat instrumen atau alat utama, yaitu:

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Untuk keperluan operasi terbuka, sejak Februari 1984 Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI merupakan instrumen moneter tidak langsung yang dilakukan Bank Sentral untuk menyedot kelebihan likuiditas perbankan jika kondisi moneter terlalu ekspansif. Operasi pasar terbuka merupakan instrumen kebijakan moneter yang penting karena dapat mempengaruhi suku bunga ataupun jumlah uang beredar secara lebih efektif. Pelaksanaan operasi pasar terbuka dilakukan secara terbuka dan pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Selain itu, operasi pasar terbuka juga dapat dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dengan frekuensi dan kuantitas sesuai yang diinginkannya.

Operasi pasar terbuka berbentuk jual beli surat-surat berharga oleh Bank Indonesia, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang maupun non lelang. Jika Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar (kebijakan uang ketat atau *tight money policy*) atau dengan kata lain menekan laju

inflasi, maka pemerintah menarik jumlah uang beredar dari masyarakat dengan jalan membuat masyarakat semakin banyak membeli SBI. Cara yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat membeli SBI adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga SBI oleh Bank Indonesia. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia dapat menarik SBI yang berada di masyarakat dengan cara membelinya. Agar semakin banyak SBI yang dijual oleh masyarakat, maka Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga SBI dan ini akan mendorong laju inflasi.

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Untuk membantu bank umum yang mengalami kesulitan dana dalam rangka ekspansi kredit, bank sentral dapat memberikan pinjaman. Pinjaman oleh bank sentral kepada bank umum tersebut disebut juga fasilitas diskonto atau tingkat diskonto. Fasilitas diskonto merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank sentral kepada bank-bank umum dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Dimana tingkat diskonto disini adalah tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh bank sentral kepada bank umum apabila mengalami kekurangan dana. Keadaan inilah yang digunakan pemerintah didalam mengendalikan jumlah uang beredar.

Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank umum untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar dan dapat melakukan ekspansi kredit

sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya jika ingin menambah laju pertumbuhan jumlah uang beredar, maka pemerintah menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral sehingga pertumbuhan jumlah uang beredar dapat ditekan yang berarti juga menekan laju inflasi.

3. Giro Wajib Minimum (*Reserve Requirement*)

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank dan disebut cadangan primer (*primary reserves*). Cadangan primer atau yang lebih dikenal dengan *reserve requirement* adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Sebagian alat likuid tersebut ada yang harus dipelihara dalam bentuk kas dan ada sebagian lainnya dalam bentuk rekening giro bank tersebut pada bank sentral.

Cadangan primer ini termasuk instrumen tidak langsung karena pada satu sisi akan mempengaruhi kemampuan bank memberikan kredit dan pada sisi lain tingkat suku bunga. Meskipun merupakan instrumen tidak langsung, cadangan primer ini adalah jenis instrumen yang bersifat *non-market based* karena jumlah cadangan primer ditentukan oleh bank sentral.

Giro wajib minimum yaitu suatu peraturan dari bank sentral kepada bank-bank umum dengan menentukan besar kecilnya tingkat cadangan minimum (*reserve requirement*). Apabila bank sentral menaikkan cadangan minimum bank-bank umum akan mengakibatkan berkurangnya ekspansi pemberian kredit oleh

bank-bank umum kepada masyarakat. Hal ini akan mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat secara berangsur-angsur dan dapat juga berarti menekan inflasi. Sebaliknya apabila bank sentral menurunkan giro wajib minimum maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar bertambah.

4. Imbauan Moral (*Moral Suasion*)

Bank sentral dapat menggunakan imbauan moral (*moral suasion*) untuk mendorong institusi financial agar membela kepentingan *public*. Biasanya, mereka menggunakan imbauan moral untuk meyakinkan para banker dan manajer senior institusi financial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya.

2.1.9 Inflasi Dan Nilai Tukar

Variabel kurs Dollar Amerika Serikat memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap inflasi di Indonesia. Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing yang disebabkan oleh hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta yang membengkak, berakibat pada menurunnya harga barang-barang ekspor kita diluar negeri, sehingga barang ekspor kita menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang dari negara lain. Penurunan harga tersebut menyebabkan peningkatan pada penjualan (hukum permintaan "apabila harga barang menurun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah"), sehingga penerimaan ekspor kita meningkat serta kemampuan untuk mengimpor barang juga meningkat maka *supply* barang di dalam negeri akan meningkat yang akan berdampak pada penurunan harga barang tersebut. Kenaikan *output* dapat memperkecil laju inflasi,

bertambahnya barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Berarti setiap terjadi depresiasi rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat maka akan meningkatkan permintaan uang di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan ketika nilai rupiah terdepresiasi maka harga barang-barang impor menjadi lebih mahal sehingga diperlukan rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli barang impor tersebut (Prasojo, 2003)

2.2 Penelitian Terdahulu

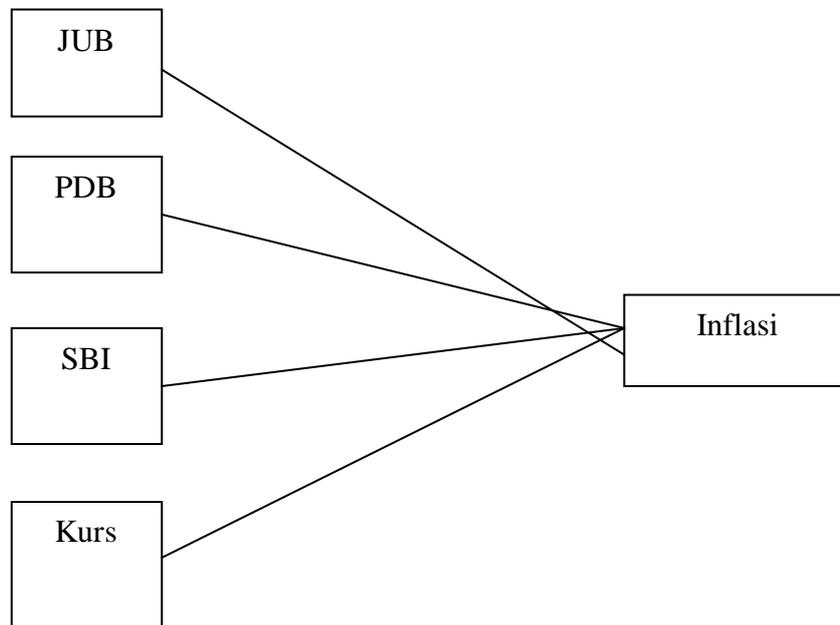
No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Fery Andrianus dan Amelia Niko	Analisa Faktor – Faktor yang mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 1997:3 – 2005:2	Menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia Periode 1997:3 – 2005:2 dengan variabel Tingkat Suku bunga Deposito (DEP1), Kurs Rupiah terhadap Dollar, Jumlah Uang Beredar, dan produk Domestik Bruto	Ordinary Least Square (OLS) dan Partial Adjustment Model (PAM)	Dari penggunaan dua model OLS dan PAM ditemukan hasil yang tidak jauh berbeda, dimana dengan OLS terdapat dua variabel yang mempengaruhi inflasi, yaitu nilai tukar dan tingkat suku bunga, sedangkan dengan PAM hanya satu yaitu variabel yang mempengaruhi yaitu tingkat suku bunga. Dengan demikian bahwa pengaruh tingkat suku bunga ternyata lebih dominan mempengaruhi inflasi di Indonesia dibandingkan dengan nilai tukar, karena baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel tersebut tetap mempengaruhi inflasi sedangkan nilai tukar hanya berpengaruh pada jangka pendek saja

2.	Endri (2008)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia	Menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia yang terdiri dari variabel – variabel domestik dan variabel – variabel eksternal.	Model Kointegrasi dan Model Koreksi Kesalahan (<i>Error Correction Model</i>).	Dalam jangka panjang, instrumen kebijakan moneter, output gap, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Sementara dalam jangka pendek, yang berpengaruh terhadap inflasi adalah nilai tukar.
3.	Hamdi	Analisis pencapaian stabilitas inflasi dengan pendekatan harga di Indonesia	Menganalisa kontribusi tingkat bunga BI (BIR), suku bunga pasar uang (SBPU), permintaan domestik (DD), permintaan eksternal neto (NED), indeks harga ekspor (IHE),	Vector Autoregression (VAR)	Selain dari inflasi itu sendiri terdapat tiga variabel penelitian yang mempunyai pengaruh besar terhadap inflasi. Variabel tersebut adalah suku bunga pasar uang (SBPU), Indeks harga ekspor (IHE), dan permintaan eksternal neto (NED)

			dan indeks harga impor (IHI) terhadap inflasi di Indonesia		
4.	Hertiana Ikasari	Determinan Inflasi (Pendekatan Klasik)	Menganalisis pengaruh uang primer dan produk domestik bruto riil terhadap laju inflasi di Indonesia pada tahun 1998.1 – 2003.4	Error Correction Model (ECM)	Dalam jangka pendek, variabel uang primer tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi dan sebaliknya variabel produk domestik bruto riil berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Variabel uang primer pada kuartal sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, sementara variabel Produk Domestik Bruto Riil pada kuartal sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Dalam jangka panjang variabel uang primer tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, sebaliknya variabel Produk Domestik Bruto Riil berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi.
5.	Wijoyo Santoso	Kebijakan	Konsiderasi	<i>vector</i>	Hasil penelitian pengujian empiris menunjukkan bahwa

	<p>dan Iskandar (1999)</p>	<p>Moneter dengan <i>Inflation Targetting</i> (Konsiderasi kemungkinan penerapan <i>inflation targetting</i> di Indonesia)</p>	<p>kemungkinan penerapan <i>inflation targetting</i> di Indonesia</p>	<p><i>autoregressi on</i> dan <i>Granger causality test</i> versi <i>Hsiao</i></p>	<p>kebijakan moneter dengan <i>Inflation Targetting</i> dapat digunakan di Indonesia khususnya setelah era sistem nilai tukar fleksibel. Pengendalian moneter dalam kerangka <i>Inflation Targetting</i> dapat dilakukan dengan menggunakan suku bunga PUAB <i>overnight</i> sebagai kandidat utama sasaran operasional dan MCI sebagai sasaran antara, sementara <i>underlying inflation</i> sebagai sasaran akhir tunggal. Sementara penggunaan MCI sebagai sasaran antara tidak dilakukan secara kaku (<i>policy rules</i>) tetapi dimungkinkan terjadinya <i>discretionary policy</i> sepanjang <i>shock</i> terhadap inflasi dan nilai tukar berasal dari <i>supply shock</i> dan bersifat sementara. Disamping itu, masih kuatnya hubungan langsung antara <i>monetary aggregates</i> dengan inflasi maka pengalihan kebijakan moneter dari <i>quantity targetting</i> ke <i>price targetting</i> bukan merupakan substitusi penuh. <i>Monetary aggregates</i> masih tetap digunakan sebagai variabel indikator untuk mendeteksi tekanan terhadap inflasi.</p>
--	----------------------------	--	---	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan:

JUB : Jumlah uang beredar (M2)

PDB : Produk domestik bruto riil

SBI : Tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia

Kurs : Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar

Penjelasan:

Variabel JUB dalam arti luas (M2) berpengaruh terhadap inflasi sebagaimana dijelaskan oleh teori kuantitas Fisher. Dalam teori tersebut, Fisher menyatakan inflasi erat kaitanya dengan JUB. Jika terjadi kenaikan jumlah uang

beredar, maka akan menstimulus terjadinya inflasi, dengan asumsi kecepatan jumlah uang beredar dan volume produksi perekonomian bersifat konstan ($M.V=P.T$)¹. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang beredar maka tidak akan terjadi inflasi, meskipun terjadi kenaikan harga. Misalnya saja jika terjadi kegagalan panen, harga cenderung naik, namun kenaikan harga beras tersebut hanya sementara waktu saja dan tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Dengan demikian, bila jumlah uang beredar tidak ditambah lagi, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Kondisi tersebut bisa terjadi karena jumlah barang atau jasa yang tersedia di masyarakat lebih kecil dari pada jumlah uang beredar yang ada, sehingga bisa menimbulkan inflasi dan sebaliknya.

Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap inflasi sebagaimana dijelaskan penyebab inflasi dari sisi tarikan permintaan (*demand pull inflation*). Kenaikan permintaan agregat (*Agregat Demand/AD*) yang tidak diimbangi dari sisi penawaran agregat (*Agregat Supply/AS*) akan menimbulkan celah inflasi atau *inflationary gap* yang merupakan sumber dari inflasi. Selain itu, menurut Teori Keynesian kenaikan PDB sisi pengeluaran akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Bila jumlah permintaan efektif terhadap komoditas meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary gap* akan timbul dan menimbulkan masalah inflasi.

¹ Merupakan persamaan kuantitas uang Fisher, dimana M (JUB) akan berhubungan positif dengan tingkat harga.

Variabel tingkat bunga SBI berpengaruh negatif terhadap inflasi sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Tingkat bunga SBI merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi inflasi. Ketika Bank Sentral ingin meredam laju inflasi, maka bisa menaikkan tingkat bunga SBI untuk menarik dana masyarakat untuk membeli SBI melalui mekanisme operasi pasar terbuka (OPT). Dengan demikian jumlah uang beredar akan turun dan inflasi akan juga turun.

Variabel kurs berpengaruh positif terhadap inflasi. Kondisi ini bisa dijelaskan melalui sebab terjadinya inflasi dari sisi *imported inflation*. Ketika kurs Rupiah terdepresiasi terhadap Dollar AS, maka harga barang impor akan naik dan bisa menstimulus kenaikan harga barang di domestik. Selain itu, depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS akan mendorong permintaan uang untuk menambah kekurangan likuiditas akibat kenaikan harga yang disebabkan depresiasi Rupiah. Dengan asumsi permintaan uang tersebut direspon dengan menambah jumlah uang beredar ($MD = MS$)² maka kenaikan jumlah uang beredar juga bisa menstimulus kenaikan harga.

² Merupakan keseimbangan pasar uang, dimana permintaan uang akan selalu sama dengan penawaran uang. Jika terjadi kenaikan permintaan uang, maka akan dipenuhi dengan penambahan jumlah uang beredar.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Diduga jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) berpengaruh secara positif terhadap inflasi
- b. Diduga produk domestik bruto berpengaruh secara positif terhadap inflasi
- c. Diduga tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia berjangka 1 bulan akan berpengaruh secara negatif terhadap inflasi
- d. Diduga nilai tukar kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah akan berpengaruh secara positif terhadap inflasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi antara lain Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan adalah :

1. Data Inflasi di Indonesia tahun 2000.1 – 2011.4.
2. Data Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) di Indonesia tahun 2000.1 – 2011.4.
3. Data Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2000.1 – 2011.4.
4. Data tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia di Indonesia tahun 2000.1 – 2011.4.
5. Data nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat tahun 2000.1 – 2011.4.

3.2 Definisi Variabel Operasional

3.2.1 Variabel Dependen

1. Laju Inflasi

Data inflasi yang dipergunakan adalah data laju inflasi dalam periode kuartalan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) melalui statistik ekonomi keuangan Indonesia (SEKI) dengan satuan persen (%).

3.2.2 Variabel Independen

1. Jumlah Uang Beredar (JUB)

Data jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) untuk Indonesia. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan perhitungan bulanan kemudian diolah menjadi kuartalan dan dinyatakan dalam bentuk satuan jutaan rupiah.

2. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (PDB) dalam penelitian ini digunakan sebagai proksi atas output nasional Indonesia. PDB adalah nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara oleh faktor produksi milik warga negara dalam negeri atau luar negeri dalam satu tahun tertentu yang dinyatakan dalam milyar rupiah. PDB dalam penelitian ini menggunakan harga konstan tahun 2000. PDB dalam penelitian ini adalah PDB menurut jenis penggunaan (sisi permintaan)

3. Suku Bunga SBI

Adalah suku bunga sertifikat bank Indonesia berjangka 1 bulan (SBI 1 Bulan) dan merupakan instrumen kebijakan moneter bank sentral. Angka suku bunga SBI dalam satuan persen.

4. Nilai tukar kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika (Kurs)

Adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Pengujian Hipotesa

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatar belakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 1995)

3.3.1.1 Uji Signifikansi Parameter (Uji t)

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independent secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikansi dan pengaruh variabel independent secara individu terhadap variasi terhadap variabel independent lainnya. Disini peneliti menggunakan uji t melalui probabilitas, penjelasannya sebagai berikut:

$$t - \text{hitung} = \frac{\beta_1}{SE(\beta_1)}$$

dimana:

β_1 = nilai koefisien regresi

SE = nilai standar error dari β_1

Dengan menggunakan tingkat keyakinan (*level of significant*) atau α tertentu, $df=n-k$ ($df=degree\ of\ freedom$). Apabila nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ari Sudarman, 1984 : 124).

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_1 < 0$; berarti variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependent.

$H_1 ; \beta_1 > 0$; berarti variabel independent mempengaruhi variabel dependent.

Apabila probabilitas < dari 0.05, maka dapat dikatakan signifikan.

3.3.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel – variabel independent secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependent. Disini peneliti melakukan uji F dengan menggunakan probabilitas, perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (n - K)}$$

dimana :

R^2 = Adalah koefisien determinasi.

n = Adalah jumlah sampel (observasi).

K = Adalah banyaknya parameter/koefisien regresi plus constant.

Dengan tingkat keyakinan α tertentu df (n-k, k-1), jika F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa uji secara serempak semua variabel independen yang digunakan dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, maka variabel independent secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependent.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, maka variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent.

Apabila probabilitas (F-Statistik) < dari 0.05 , maka bisa dikatakan signifikan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil keputusan dengan menggunakan probabilitas.

3.3.1.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. Sebaliknya, makin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependent yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independent.

Sifat dari koefisien determinasi adalah :

1. R^2 merupakan besaran yang non negatif.
2. Batasnya adalah ($0 \leq R^2 \leq 1$). (Gujarati, 1995)

Apabila R^2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independent dengan variabel dependent. Semakin besar nilai R^2

maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi.

3.3.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pada prakteknya, beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk mengestimasi suatu model dengan sejumlah data. Maka sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model yang digunakan, terlebih dulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik model OLS, sehingga model tersebut layak digunakan. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, pada prinsipnya model regresi linear yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan Estimator) dalam pengertian lain model yang dibuat harus lolos dari penyimpangan asumsi adanya serial autokorelasi, normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut diatas akan menyebabkan uji statistik (uji t-stat dan f-stat) yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik akan mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

3.3.2.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi hal ini

digunakan uji *Jarque-Berra*, uji menggunakan distribusi probabilitas. Dimana jika probabilitasnya lebih besar dari alpha 5 persen maka uji normalitas diterima. Justifikasi lainnya untuk Deteksi ini adalah dengan membandingkan nilai J-B hitung dengan χ^2 tabel, apabila J-B hitung $< \chi^2$ tabel maka residual U_t terdistribusi normal. (Gujarati, 1995)

3.3.2.2 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah tidak adanya hubungan linear antar variabel independent dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependennya. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dengan membandingkan nilai koefisien determinasi parsial (r^2) dengan nilai koefisien determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari nilai R^2 maka tidak terdapat multikolinearitas. Cara lain untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan korelasi antar variabel dimana apabila kurang dari 0.8 maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan variabel di atas 0.8 maka terdapat multikolinieritas (Gujarati, 1995:335).

3.3.2.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data runtut waktu

atau *time series*) atau ruang (seperti dalam data lintas sektoral atau *cross section*).

Deteksi terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey, dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat, apalagi jika sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Deteksi ini dilakukan dengan memasukkan lagnya, dari hasil deteksi autokorelasi *Serial Correlation LM Test Lag*.

Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi, dengan pedoman :

1. Apabila x^2 hitung (obs R-Squared) $> x^2$ tabel, maka menolak hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi.
2. Apabila x^2 hitung (obs R-Squared) $< x^2$ tabel, maka menerima hipotesis nol (H_0) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi.

3.3.2.4 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala

heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Imam Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual, deteksi ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (Ut^2) dengan variabel bebas.

Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan *Obs*Rsquared*, secara khusus adalah nilai probability dari *Obs*Rsquared*. Dengan uji White, dibandingkan dengan *Obs*Rsquared* dengan χ^2 (*Chi-Squared*) tabel. Jika nilai *Obs*Rsquared* lebih kecil daripada χ tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model (Gujarati,1995).